

**RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

RENJA ini merupakan formalisasi dari perencanaan strategi Tahun 2024 dalam rangka tindak lanjut Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao 2024 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). Dan juga untuk memberikan arah dan pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman yang taktis dan strategis guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao umumnya.

Ba'a, 17 Juli 2023

Plt. Kepala pelaksana BPBD,
Kabupaten Rote Ndao



Diksel S. Haning, SE
Pembina

NIP. 19771210 200701 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur BPBD	8
2.2 Sumber Daya BPBD	16
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten/Kota.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	42
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Berdasarkan Jabatan sesuai ABK, Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.2	Data PNS Berdasarkan Urutan Jabatan Kepegawaian	16
Tabel 2.3	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.4	Data Jenjang Pendidikan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kab. Rote Ndao	42
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kab. Rote Ndao	43
Tabel 5.1	Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kab. Rote Ndao	44
Tabel 5.2	Perubahan Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kab. Rote Ndao	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020	47
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	55
Tabel 7.2	Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.....	10
------------	--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 151 ayat (2) menyatakan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan

Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013–2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;
 18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RENJA BPBD Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Untuk melakukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- b. Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2. Tujuan Penyusunan RENJA

Perubahan RENJA BPBD Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian RENJA penyusunan Perangkat Daerah, fungsi RENJA Perangkat Daerah, Proses RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan RENJA Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target RENJA Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih: bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan RENJA Kemeterian/Lembaga dan RENJA Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.1 Tugas Fungsi dan Struktur BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki tugas pokok, fungsi dan struktur seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

a. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao bertugas :

1. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanganan Bencana;
5. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
6. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

1. perumusan dan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Struktur Organisasi, Sistem dan Prosedur Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki struktur organisasi dan tata kerja seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 8 Januari 2023, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

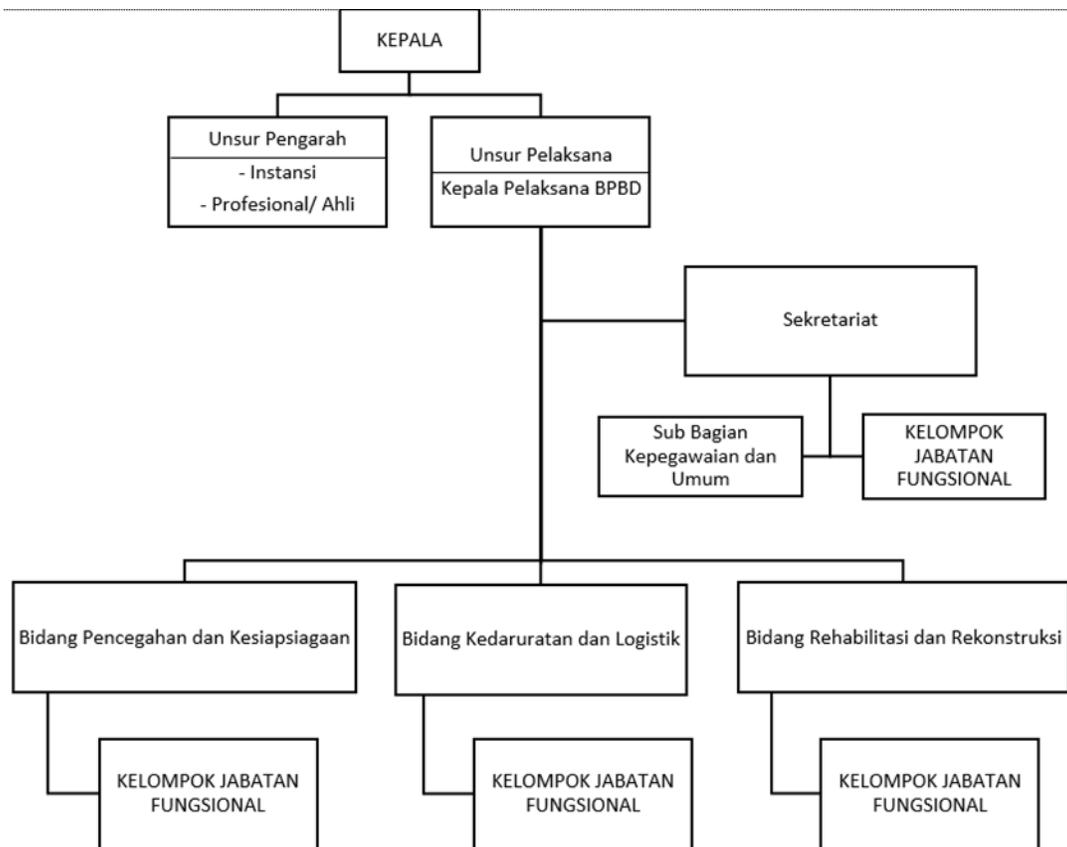
Sebagai sebuah organisasi yang cukup kompleks, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memerlukan sebuah struktur organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terkena bencana. Semua kegiatan dan berbagai tugas serta proses yang harus diselesaikan, harus diatur melalui struktur organisasi.

Produk yang harus dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaannya berada dalam berbagai bidang. Dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003, terlihat jelas ada 2 kewenangan yaitu kewenangan manajemen dan kewenangan profesional.

Kewenangan manajemen bagaimana melakukan penyediaan kebutuhan, menyusun kebijakan atau regulasi aturan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, memfasilitasi serta mengkoordinasikan terhadap seluruh bidang sehingga memberikan dukungan maksimal terhadap proses pelayanan cepat kepada masyarakat.

Sedangkan kewenangan profesional adalah menyelenggarakan sistem nasional Penanggulangan Bencana di daerah sesuai kaidah profesionalitas dan kompetensi para pemangku kepentingan terkait. Seperti gambar struktur dibawah ini:

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN ROTE NDAO
 Sesuai Perbup Nomor 3 Tahun 2023



Sedangkan kondisi personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kondisi Personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

N O	NAMA DAN JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Plt. Kepala Pelaksana Diksel S. Haning, SE	Pembina / IVa	1	1	-
	- Sekretaris Diksel S. Haning, SE		1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	- Bendahara	-	1	1	-
	Katarina A. Hangge	Penata Muda/ III a	-	-	-
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	1	(1)
	- Pengelola Barang Milik Negara	-	1	1	-
	Yeandry J.R. Sanu, S.Sos	Penata Muda/ III a	-	-	-
	- Pengemudi	-	-	2	(2)
	2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jeskiel M. Nalle, SH	Penata Tk. I/ III d	1	1
- Analis Bencana		1		1	-
Paskalis P.V.Y.I. Laetupen, ST		Penata Muda/ III a	-	-	-
- Penyuluh Bencana		-	1	1	-
3	Gomerleys A. Lenama, S.Sos Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Penata Muda/ III a	1	1	-
	Taroci Theodorus, SE	Penata Tk. I/III d	-	-	-
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	-	1	1	-
	Junus J. Lusi, S.Sos	Penata Muda/ III a	-	-	-
4	- Pranata Bencana	-	1	1	-
	Adrianus Adu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pengatur Muda Tk. I/ II b	1	1	-
	YohanisN.Ndoen,SE	Penata/IIIc	-	-	-
	- Analis Mitigasi Bencana	-	1	2	(1)
	Yulianita Gati, ST Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Penata Muda/ III a	-	1	(1)

Uraian tugas jabatan BPBD Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2011 sebagai berikut:

1. Uraian Tugas Kepala Pelaksana Badan :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana kerja tahunan badan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan pendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala bidang baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan memberikan motivasi dan rangsangan kerja kepada personil agar terciptanya kesamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan serta menindaklanjuti laporan / pengaduan masyarakat akibat bencana yang terjadi;
6. Melakukan koordinasi program kerja dengan instansi dan / atau pihak terkait baik pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
7. Membina dan memotivasi bawahan melalui bimbingan dan pelatihan teknis untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kinerja;
8. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai data dan informasi berdasarkan pola penanggulangannya agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan guna penyelesaian suatu masalah;
10. Mengkoordinasikan program kerja dengan instansi dan/atau pihak terkait baik pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
11. Menyampaikan laporan, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Uraian Tugas Sekretaris :

1. Merencanakan, memngedalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan (keuangan, umum dan kepegawaian) atas dasar hasil kerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan agar didapatkan hasil yang maksimal;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan badan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
7. Mengkoordinir penelitian dan pengkajian anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
8. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
9. Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada pada badan agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengkajian bahaya dan kerawanan, menganalisa potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); agar dilakukan peringatan dini, pencegahan dan mitigasi, serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
7. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang akan timbul di daerah dan dampaknya terhadap lingkungan sosial ekonomi, untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan mengantisipasi dampak bencana pada lingkungan sosial ekonomi;
8. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta mensiagakan masyarakat dari ancaman bencana.
9. Melakukan monitoring dan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana;
10. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;

4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Kedaruratan dan Logistik agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program Kedaruratan dan Logistik yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan menyediakan dan memberikan logistik pada daerah bencana;
7. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman/petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas – tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
6. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk merencanakan program/kegiatan lebih lanjut;
7. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan usaha – usaha rehabilitasi bagi korban bencana untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan;

8. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya PD

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2023 didukung oleh 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 (tujuh belas) orang tenaga kontrak daerah.

Tabel berikut menggambarkan data-data kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Urutan Jabatan Kepegawaian

NO	JABATAN	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH
I	JABATAN STRUKTURAL			
1	Plt. Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1	-	1
I	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-
II	PELAKSANA	5	2	7
III	PROFESIONAL / AHLI	-	-	-
	TOTAL	10	3	13

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Rote Ndao 2023

Tabel 2.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister (S2)	-
2	Sarjana (S1)	11
3	Sarjana Muda/D II - D.III	-
4	SLTA/Sederajat	2
5	SLTP	-
6	SD	-
	TOTAL	13

Sumber : Data Kepegawaian BPBD, Rote Ndao 2023

Tabel 2.4 Data Jenjang Pendidikan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Laki-Laki	Perempuan
1	Magister (S2)	-	-
2	Sarjana (S1)	9	2
3	Sarjana Muda/D II - D.III	-	-
4	SLTA/Sederajat	1	1
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
	TOTAL	10	3

Tabel 2.5 Data Tenaga Kontrak Daerah Tahun 2023 berdasarkan Nama, Jabatan dan Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT)

N O.	N A M A	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1.	Semi Imanuel Nggili	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
2.	Jacobis Kolioe, SE	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
3.	Erastus Eli Laka	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
4.	Jedy A.Taek	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
5.	Agustina Ndolu	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
6.	Marten Mbelanggedo	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
7.	Melkiur Ndaumanu	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
8.	Hendrik Ndun	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
9.	Welhelmus Mooy	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
10.	Juandri L. Manafe	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
11.	Zacharias Pandie	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
12.	Justy Y. Solokana	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
13.	Ahmad Aked	Tenaga TRC / Teknisi	SPMT Januari 2023
14.	Charlex Y. Haning	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
15.	Melkianus Pakuleo	Tenaga TRC	SPMT April 2023
16.	Kiprianus I. Saudale	Tenaga TRC	SPMT April 2023
17.	Leksi A. Boik	Tenaga TRC	SPMT April 2023
18.	Delvi R. Mistuni	Tenaga Administrasi	SPMT April 2023
19.	Gelsi R. Kiak	Tenaga TRC	SPMT April 2023
20.	Yoga A.F. Mbooh, S.Sos	Tenaga TRC	SPMT April 2023

Tabel yang menggambarkan ketersediaan aset berupa peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, kondisi dan tahun perolehan terlampir pada bagian belakang rencana strategis ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dilantik Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III, dimana secara aturan telah melaksanakan tugas dengan personel yang masih sangat terbatas. Dari segi kinerja pelayanan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada RPJMD tahun 2014-2019.

Kemudian dalam kinerja pelayanan dapat diuraikan secara rinci program kegiatan yang periode sebelumnya:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Urusan Wajib																		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1	Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Meningkatnya upaya penanggulangan bencana			Jumlah Analisis Risiko Bencana	100 orang	100 orang	100 orang	125 orang	125 orang	100 orang	100 orang	100 orang	125 orang	125 orang	100	100	100	100	100
				Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 desa	10 desa	2 desa	2 desa	10 desa	2 desa	10 desa	2 desa	2 desa	10 desa	100	100	100	100	100
				Jumlah Poskolap yang Tersedia	1 posko	1 posko	1 posko	1 posko	1 posko	-	1 posko	1 posko	1 posko	1 posko	-	100	100	100	100
				Jumlah Masyarakat Sadar Bencana	-	150 orang	-	150 orang	150 orang	150 orang	100	-	100	100	100				
				Jumlah pelatihan/perengkapan TRC Yang Kompeten	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	100	100	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2019
2	Menaurangi risiko bencana pada masyarakat Membangun daerah rawan bencana			Jumlah Data Kerugian Akibat bencana	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	100	100	100	100
				Jumlah Data Korban Bencana	1 dokumen	1 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	100	100	100	100
				Jumlah Aplikasi Simadu Bencana	-	1 paket	-	-	1 paket	-	1 paket	-	-	1 paket	-	100	-	-	-
3	Meningkatnya standar kehidupan korban bencana perumahan			Jumlah rapat koordinasi perbaikan rumah akibat bencana	1 paket	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	100

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Tidak Langsung	554.691.350	618.273.000	626.476.200	620.248.950	565.506.600	539.248.781	610.987.729	567.140.991	560.539.412	506.548.543	90%	97%	99%	91%	97%	602.130.144	561.849.905
Gaji Pokok/Uang Representasi						380.107.618	434.747.160	408.877.851									
Tunjangan Keluarga						41.915.406	39.621.446	37.519.702									
Tunjangan Jabatan						45.571.500	44.460.000	44.460.000									
Tunjangan Fungsional Umum						12.678.575	14.235.000	11.830.000									
Tunjangan Beras						27.457.536	27.809.280	26.071.200									
Tunjangan PPh						9.116.333	10.307.523	1.910.755									
Pembulatan gaji Tambahan penghasilan PNS						44.382,60	7.320	6.462									
						37.800.000	39.800.000	36.465.000									
2. Belanja Langsung	1.175.693.100	1.681.441.850	5.313.087.574	1.161.026.000	1.367.926.000	1.123.237.341	1.577.450.923	5.237.867.600	1.124.133.080		95%	96%	94%	99%	90%	2.048.031.944,80	1.985.973.159
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	388.063.300	374.602.500	252.470.168	258.509.600	289.068.000	383.782.600	350.128.700	251.079.100	254.432.280	282.913.400	93%	99%	93%	99%	98%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	918.000	918.000	918.000	918.000		918.000	918.000	918.000	918.000		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000	9.600.000	4.800.000	9.000.000		5.601.000	6.683.300	3.534.000	7.625.400		72%	93%	70%	74%	85%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional	2.117.500	29.086.100	2.250.000	2.250.000		436.000	10.327.500	2.250.000	1.778.800		13%	21%	36%	100%	79%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keu	40.820.000	38.880.000	45.000.000	45.000.000		40.820.000	38.880.000	45.000.000	45.000.000		100%	100%	100%	100%	100%		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	506.500	506.500	506.500	506.500		506.500	506.500	506.500	506.500		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	-		100%	100%	100%	100%	0%		
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.039.300	10.039.300	10.039.300	10.039.300		10.039.300	10.039.300	10.039.300	10.039.300		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.640.000	10.166.600	8.217.800	8.217.800		10.639.800	10.162.350	8.217.800	8.217.800		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	604.000	604.000	308.000	308.000		604.000	604.000	308.000	308.000		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.800.000	21.640.000	20.760.000	22.600.000		87.600.000	21.640.000	20.760.000	22.600.000		100%	98%	100%	100%	100%		
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	2.560.000	2.943.000	1.820.000		100%	100%	85%	98%	61%		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.916.000	2.916.000	7.665.000	7.665.000		2.916.000	2.916.000	7.665.000	7.665.000		100%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94.180.000	149.428.000	63.932.568	63.932.000		94.180.000	148.044.750	63.902.500	63.931.880		100%	100%	99%	100%	100%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	17.000.000	17.000.000	15.900.000	15.900.000		17.000.000	16.950.000	15.900.000	15.900.000		87%	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi NTT	108.472.000	79.768.000	68.123.000	68.123.000		108.472.000	78.847.000	68.085.000	68.121.600		100%	100%	99%	100%	100%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	267.310.000	239.600.000	241.500.000	151.200.000	180.000.000	266.807.941	236.195.000	231.174.000	797.980.600	176.862.000	100%	100%	99%	96%	528%		
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	267.310.000	239.600.000	241.500.000	151.200.000		266.807.941	236.195.000	231.174.000	151.200.000	-							

Dinas/Operasional												100%	100%	99%	96%	100%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.092.000	-	-	-	-	13.092.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur	13.092.000	-	-	-	-	13.092.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
Program Pengembangan Data/ Informasi	-	38.960.000	-	-	45.000.000	-	38.948.000	-	-	44.965.000	-	-	98%	-	-	98%		
Pengelolaan Sistem Informasi Terpadu (SIMADU) Kebencanaan	-	38.960.000	-	-	-	-	38.948.000	-	-	-	-	-	99%	-	-	-		
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	26.566.550	-	-	-	-	26.316.550	-	-	-	-	-	-	97%	-	-	-		
Rapat Koordinasi Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	26.566.550	-	-	-	-	26.316.550	-	-	-	-	-	-	98%	-	-	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	-	607.776.750	266.499.300	431.030.000	175.000.000	-	531.676.623	265.185.300	230.068.800	174.330.000	-	-	99%	87%	100%	99%		
Koordinasi, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pasca Bencana	-	41.018.400	42.561.200	42.561.000	-	-	40.918.400	42.461.200	42.436.000	-	-	-	99%	100%	100%	100%		
Pendataan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kaji Cepat TRC penanganan bencana pada saat tanggap darurat	-	566.758.350	223.938.100	189.069.000	-	-	490.758.223	222.724.100	187.632.800	-	-	-	99%	98%	87%	99%	99%	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan bencana social	420.502.600	4.552.627.106	519.686.400	519.686.400	651.858.000	107.925.000	433.238.250	420.502.600	4.490.429.200	641.733.400	-	-	98%	90%	100%	99%	98%	

Pembuatan dan Pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya dan larangan memasuki daerah rawan bahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peduli Bencana Kegiatan Pasca bencana	-	74.499.300	4.089.954.600	89.954.000	-	74.499.300	4.049.144.300	87.429.000	-	100%	100%	99%	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Tim Reaksi Cepat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan resiko bencana (PRB)	107.800.000	107.800.000	123.733.500	152.125.500	-	92.102.000	123.733.500	151.434.500	145.726.250	-	96%	85%	100%	100%	-	-	-
Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana	23.142.450	119.870.000	122.979.500	103.348.500	-	23.142.450	119.870.000	115.148.500	101.746.850	-	98%	100%	100%	94%	-	-	-
Pelatihan Satiak Penanggulangan Bencana (pelatihan Tanggap Darurat TRC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventarisasi/Pendataan Kerusakan pada Lokasi Bencana 5(lima) Tahun terakhir untuk rekonstruksi sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi pembentukan pos Komando (Poskolap) lapangan tanggap darurat bencana	176.676.600	102.399.800	187.567.506	174.258.900	-	169.671.600	102.399.800	174.701.900	153.529.900	-	88%	96%	100%	93%	-	-	-
Belanja Tidak Terduga						1.053.500.000 (507 KK)	1.252.500.000 (857 KK)	954.500.000 (305 KK)	920.410.000 (1073 KK + tenggelam)	1.653.000.000 (654 KK)							

2.4 .Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao.

Kesadaran akan upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Konferensi Hyogo tahun 2005-2015 menyepakati ada 5 (lima) kelompok prioritas yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni :

- a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas Nasional dan Daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
- b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini;
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
- d. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar;
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi proses yang efektif di semua tingkat.

Selanjutnya dalam Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan Risiko Bencana 2015 bahwa hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun : pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana (periode 2015 -2030)

Kemudian Pengurangan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan / sustainable development goals (SDGs) bertujuan untuk :

Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;

Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

Tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Sedangkan di tingkat Nasional, telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Landasan hukum ini telah memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia, baik aspek legalisasi, institusi, maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana lebih lanjut pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan mengingat kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, maka terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kabupaten Rote Ndao resmi terbentuk sejak tahun 2002 dan secara administrasi pada tahun 2018 terbagi atas 10 Kecamatan, 82 Desa induk, 30 Desa pemekaran dan 7 Kelurahan dengan jumlah penduduk 159.614 jiwa dan luas wilayah 1.280.10 Km² atau 128.010 Ha

dengan topografi kebanyakan terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai. Melihat dari kajian tata ruang yang ada beberapa wilayah di Kabupaten Rote Ndao adalah kawasan rawan bencana alam meliputi tanah longsor, gelombang pasang, abrasi pantai, banjir, angin-badai-tsunami dan kekeringan. Adapun sebaran kawasan rawan bencana seperti pada tabel berikut berdasarkan pendataan daerah potensi bencana yang dilakukan pada tahun 2018.

NO	Kecamatan/Desa	JENIS POTENSI BENCANA							
		Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami
1	Rote Barat Daya								
	1 Oeseli	√	√						
	2 Oebau		√						
	3 Lalukoen								
	4 Oetefu								
	5 Oehandi		√	√					
	6 Meoain								
	7 Oebafok								
	8 Batutua	√							
	9 Dolasi								
	10 Lekik								
	11 Oebatu								
	12 Mbokak								
	13 Oelasin		√						
	14 Landu	√	√						
2	Rote Barat Laut								
	1 Lidor		√						
	2 Temas								
	3 Modosinal		√						
	4 Busalangga								
	5 Oetutulu		√						
	6 Daudolu		√	√				√	
	7 Netenaen		√					√	
	8 Inguinak								
	9 Oelua		√		√	√			
	10 Tolama			√	√	√			
	11 Oebela		√						
	12 Boni		√						
	13 Tualima		√	√					

	Kecamatan/Desa	Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami
3	Lobalain								
	1	Kuli	√	√		√			
	2	Suelain	√	√					
	3	Bebalain	√	√					
	4	Kolobolon	√						
	5	Oematamboli	√	√					
	6	Helebeik	√						
	7	Oelunggu	√	√					
	8	Mokdale		√					
	9	Sanggaoen	√						
	10	Holoama	√						
	11	Tuanatuk	√	√					
	12	Baadale	√	√		√			
	13	Namodale		√		√		√	
	14	Metina		√		√			
4	Rote Tengah								
	1	Lidabesi	√	√	√				
	2	Limakoli	√	√	√				
	3	Suebela	√	√	√				
	4	Nggodimeda	√	√	√	√		√	√
	5	Lidamanu	√	√	√				
	6	Maubesi	√						
	7	Onatali	√	√	√	√		√	√
5	Rote Selatan								
	1	Inaoe	√	√					
	2	Dodaek				√			
	3	Tebole				√			
	4	Daleholu	√	√					
	5	Lenguselu	√	√					
6	Pantai Baru								
	1	Nusakdale						√	
	2	Batulilok	√	√				√	
	3	Lenupetu	√						
	4	Sonimanu	√	√				√	
	5	Oebau	√	√					
	6	Oeledo							
	7	Keoen	√						
	8	Edalode						√	
	9	Olafulihaa		√					
	10	Tunganamo	√	√		√			
	11	Tesabela		√					

	Kecamatan/Desa	Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami
7	Rote Timur								
	1	Lakamola							
	2	Mukekuku		√					
		Faifua		√					
	4	Hundihopo		√					
	5	Londalusi		√					
	6	Serubeba		√					
	7	Matasio							
8	Landuleko								
	1	Bolatena		√			√		
	2	Sotimori		√			√		
	3	Daiama	√	√	√				
	4	Lifuleo	√	√			√		
	5	Daurendale		√	√			√	
	6	Pukuafu	√	√				√	
9	Rote Barat								
	1	Oelolot	√			√			
	2	Oenitas		√					
	3	Mbueain	√						
	4	Bo'a				√			
	5	Oenggaut	√						
	6	Nemberala	√						
	7	Sedeoen	√						
10	Ndao Nuse								
	1	Ndao Nuse		√	√	√			
	2	Mbali Lendeiki		√					
	3	Mbiu Lombo			√	√			
	4	Anarae		√	√	√			
	5	Nuse		√	√	√			

a. Kawasan rawan longsor

Bahaya tanah longsor, potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, Desa Kolobolon, Desa Suelain, Desa Bebalain, Desa Oematamboli, dan Desa Loleoen. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote

Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao;

b. Kawasan rawan banjir

Bahaya banjir disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan pada musim penghujan, serta kemiringan lahan yang relative datar sehingga semakin memperlambat pengaliran air ke laut. Bahaya banjir berpotensi terjadi disebagian besar wilayah Rote Ndao, potensi kerentanan terbesar terjadi di Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Mundek, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandi, Desa Oelua, Desa Oenitas, Desa Sanggaoen, Desa Temas, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Loleoen, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli.

c. kawasan rawan gelombang pasang

Bahaya Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan Nopember sampai bulan Pebruari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tunganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimeda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeen, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbailendeki, Desa Anarae dan Desa Mbuilombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Pebruari.

d. kawasan rawan kekeringan

Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu umumnya berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa

Hundiho, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai, Desa Daiama, Desa Loleoen, Desa Bebalain, dan Desa Suelain.

Salah satu aspek penting yang sangat mewarnai sistem penanggulangan bencana adalah Desentralisasi. Upaya penanggulangan bencana merupakan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pasal 11, 12, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Ketika urusan penanggulangan bencana menjadi urusan kewenangan bersama maka dalam konteks ini unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besaran yakni:

- a. Pemerintah;
- b. Dunia usaha;
- c. Masyarakat.

Menyatunya ketiga kelompok ini, dimaksud agar adanya suatu kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu ketiga unsur tersebut harus mempunyai :

- a. Kesamaan persepsi tentang kebencanaan dan penanggulangannya,
- b. Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya.

Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan di kalangan masyarakat, pemangku dan kepentingan terkait lainnya sebab persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan (*Consensus Building*).

Dalam kerangka penanggulangan bencana, sistem nilai masyarakat (kearifan lokal) baik sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik rawan dan titik aman untuk pengungsian agar dalam proses pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Rote Ndao terdapat 6 desa yang memiliki kerentanan dan resiko iklim sangat tinggi (sangat rentan) di antaranya Desa Lalukoen, Desa Lekik, Desa Oelasin, Desa Landu dan Desa Bebalain.

Kerentanan dan perubahan iklim mengakibatkan tingginya resiko bencana yang merupakan bahaya yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi lingkungan atau infrastruktur. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor. Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan, kejadian iklim yang ekstrim ini berkaitan dengan kejadian

El Nino yang berhubungan dengan kekeringan dan *La Nina* berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana tahun 2013 Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam kabupaten dengan Indeks Rasio Bencana (IRB) kelas sedang dengan skor 142 yang rawan terhadap bencana alam khususnya longsor, banjir dan angin puting beliung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BPBD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Seperti yang dikemukakan pada gambaran pelayanan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, dimana ketersediaan sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana dan pendanaan menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan dimaksud. Namun secara garis besar dan global permasalahan bencana merupakan risiko bencana yang dialami oleh masyarakat maupun daerah, dimana terdapat potensi (ancaman) dan kerentanan penduduk juga lingkungannya tersebut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	3	3	4
1	Tuntutan untuk menurunkan risiko bencana di masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan manajemen pengurangan risiko bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini serta adaptasi perubahan iklim	Belum ada dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana belum berjalan secara optimal
			Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi serta Gladi Kesiapsiagaan masih kurang
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan serta perlindungan terhadap bencana masih belum efektif
		Belum optimalnya pengelolaan manajemen evakuasi dan penyelamatan	Response cepat KLB/wabah zoonis prioritas/ kejadian darurat bencana serta pencarian, pertolongan, evakuasi korban masih kurang sumber daya

Permasalahan-permasalahan yang ada pada tabel 3.1 perlu mendapat perhatian serius karena sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao (RPJPD) Tahun 2002-2025 yang merupakan kaidah penuntun Pembangunan Daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berbatasan laut dengan Australia dengan karakteristik alam dan budaya berkomitmen untuk mengelola alam dengan titik berat di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

Mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”

Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPBD berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi sebagai berikut atas pertimbangan faktor penghambat dan pendorong pelayanan seperti table berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.				
No	Misi dan program KDH dan wakil Terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2	3	4	5
1.	Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infra Struktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	sumber daya untuk mengadakan Pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana	dilakukannya identifikasi, kajian, pantauan resiko bencana serta penerapan system peringatan dini	rujukan penanganan dan penanggulangan bencana
	Program Penanggulangan Bencana			

Mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin Misi ke -3 dengan sasaran difokuskan pada :

1. *Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini serta adaptasi perubahan iklim;*

dengan tujuan *Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah* sehingga baik strategi, kebijakan maupun program kegiatan dari Perangkat Daerah BPBD akan difokuskan untuk mewujudkan sasaran dari misi di atas.

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran perlu ditekankan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup tahap pra bencana, masa tanggap darurat sampai dengan pasca bencana.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rote Ndao untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana meliputi langkah penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana.

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan daerah secara berkesinambungan, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang dapat dicapai dengan meminimalisir potensi – potensi bencana yang ada sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terkait dalam pemanfaatan lingkungan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Disinilah peran Perangkat Daerah BPBD dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao khususnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

3.3 Telaahan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten/Kota

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Kemudian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran **RPJMD 2018-2023 Pemerintah Propinsi NTT** sebagai berikut :

Visi : “ Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI ”

Misinya : Mewujudkan masyarakat Sejahtera Mandiri dan Adil;

Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan; serta

Sasaran : Meningkatkan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana Daerah

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah,serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Kebijakan Strategis BNPB (2015-2019)

1. Mempercepat penyelesaian pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional dan bencana alam
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana di 136 kabupaten/kota

3. Membangun system logistic kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau, beserta kelengkapan sarana transportasinya
4. Meningkatkan ketersediaan logistic dan peralatan kebencanaan daerah
5. Meningkatkan jumlah kajian risiko bencana
6. Meningkatkan kesiapan sumber daya nasional dalam menghadapi kejadian darurat bencana (pendidikan, pelatihan dsb)
7. Percepatan manajemen pemulihan pascabencana
8. Mengkoordinasikan upaya-upaya khusus untuk pengurangan dampak bencana hidrometeorologi

Kemudian sasaran strategi BPBD Provinsi NTT :

1. Meningkatkan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha
3. Tersedianya sistem kawaspadaan dini dan mitigasi
4. Peningkatan Kapasitas dan penanganan bencana
5. Tercapainya koordinasi yang baik dengan lembaga mitra
6. Terlindunginya masyarakat dan kelompok rentan dari ancaman bencana
7. Terciptanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
8. Terlayannya masyarakat korban bencana di lokasi bencana
9. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
10. Tercapainya pemulihan fisik dan psikis masyarakat korban bencana Kab/Kota
11. Terciptanya sarana dan prasarana public dan hunian yang layak bagi masyarakat korban bencana
12. Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi korban bencana
13. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan pasca bencana
14. Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi di Kab/Kota
15. Tersedianya data yang akurat bagi pimpinan dan para stakeholder lainnya
16. Tersedianya sistem peringatan dini pada situasi potensi terjadi bencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan keterkaitan komitmen global dan arah kebijakan penanggulangan bencana baik Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 -2030 dan Pembangunan berkelanjutan (SDGs : Sustainable Development Goals, RPJMN 2015-2019 , mempunyai sasaran : Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Strategis :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
3. Peningkatan kapasitas pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

3.4.1 Kawasan Rawan Bencana Alam

Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan rawan bencana yang harus diantisipasi. Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam, seperti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami.

3.4.1. 2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bajir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Rote Selatan.

Upaya mitigasi lintas sektoral penanganan bencana banjir meliputi :

1. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
2. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.
3. Menyiapkan peta daerah rawan banjir
4. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan
5. Normalisasi sungai/kali

3.4.1.2. Kawasan rawan Bencana Erosi/Tanah longsor

Erosi tanah/tanah longsor dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha

pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah.

Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Timur

Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor/erosi meliputi :

1. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya;
2. Mengurangi tingkat keterjalannya lereng;
3. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara *drainase* baik air permukaan maupun air tanah (fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah);
4. Pembuatan bangunan penahan;
5. Terasering dengan sistem drainase yang tepat (*drainase* pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah);
6. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput);
7. Khusus untuk runtuhannya batu dapat dibuatkan tanggul penahan (*rock fall*) baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
8. Pengenalan daerah yang rawan longsor;
9. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan berbentuk ladam (tapal kuda);
10. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.

3.4.1.3. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung, angin kencang, kekeringan dll)

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya cuaca ekstrem tersebar di 10 kecamatan (semua)

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana

Selain kawasan yang disebutkan diatas terdapat juga kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi: kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.

Bencana secara umum merupakan kejadian diluar kondisi normal atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan keduanya yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, yang menimbulkan gangguan tata kehidupan manusia, (UU No.24, 2007). Upaya untuk melindungi dan menyelamatkan manusia dari ancaman bencana dapat dilakukan dengan suatu tindakan dalam mengatasi bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari bencana yang diperkirakan akan terjadi. Salah satu jenis bencana dari 3 (tiga) jenis bencana yang ada adalah bencana alam (*natural disaster*).

Berdasarkan Undang-Undang no. 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan atau mengurangi ancaman bencana. Penanganan bencana (*disaster management*) merupakan suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi: pencegahan (*preventive*), mitigasi (*mitigations*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), pemulihan (*recovery*) dan pembangunan kembali (*development*)

Langkah kegiatan ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana khususnya rawan bencana kekeringan, gelombang pasang dan tsunami. Penanggulangan bencana di Kabupaten Rote Ndao harus diperhatikan, mengingat posisi geografis Kabupaten Rote Ndao berada pada jalur bencana di Dunia dan Indonesia, yaitu pertemuan lempeng Benua Asia dan Australia dan Lempeng Samudera Hindia.terdapat potensi bencana gempa tektonik yang merupakan penyebab terjadinya tsunami.

3.4.2 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Geologi meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami dan kawasan abrasi. Kawasan Lindung Geologi di kabupaten Rote Ndao menurut letaknya sebagai berikut :

- (1) kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Daya.
- (3) kawasan rawan tsunami terdapat kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Daya.
- (4) kawasan rawan abrasi terdapat di Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan fungsi tugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam lima tahun kedepan akan mengoptimalkan segala dukungan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Legislatif serta stakeholder dalam membangun kerjasama dengan terus melakukan pendekatan dan koordinasi meliputi berbagai aspek baik itu perencanaan maupun penganggaran dalam tiga fase penanggulangan bencana. Untuk itu isu strategis yang dibangun dalam mengidentifikasi sebagai faktor permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dan telaahan di atas adalah :

Penurunan Risiko Bencana

Isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rote Ndao dan sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

Mengapa Risiko Bencana harus diturunkan?

Sebab berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tahun 2012 definisi , Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun

waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Itulah alasan mengapa penurunan risiko bencana dijadikan isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rote Ndao.

Bagaimana cara menurunkan risiko bencana bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao?

Caranya adalah dengan melakukan pengkajian risiko bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat rasio bencana amat bergantung pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam

Untuk pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan suatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana berupa :

- a. Memperkecil ancaman kawasan
- b. Mengurangi kerentanan
- c. Meningkatkan kapasitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Rote Ndao

Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 – 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Perangkat Daerah BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis, dan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Perangkat Daerah BPBD bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketangguhan Bencana Daerah		Tangguh Bencana					
		Meningkatnya Pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penanganan Tanggap darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2 Perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				Target
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	8,3	-	4,1	8,3	4,1
		Meningkatnya Pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan Tanggap darurat Bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mendorong kegiatan perencanaan pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional. Strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman luas, memberikan arahan dan dorongan bagi setiap aktifitas Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao. Strategi akan dilakukan dalam periode 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi BPBD Kabupaten Rote Ndao

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”.			
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infra Struktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah	Meningkatnya pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Melakukan Pencegahan Dini, Penanganan Korban Bencana Alam, Non alam dan Sosial serta Pemulihan dampak Bencana	<p>Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh / Kelurahan Tangguh Bencana</p> <p>Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p>

Tabel 5.2 Perubahan Strategi BPBD Kabupaten Rote Ndao

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”.			
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infra Struktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Melakukan Pencegahan Dini, Penanganan Korban Bencana Alam, Non alam dan Sosial serta Pemulihan dampak Bencana	<p>Meninokatkan Persentase Jumlah Desa Tangguh / Kelurahan Tangguh Bencana</p> <p>Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD kabupaten Rote Ndao menetapkan program utama (teknis) dan program pendukung. Program utama dimaksudkan untuk mendukung tugas BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.

Program Utama :

Program Penanggulangan Bencana

Program Pendukung :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah adalah sasaran terukur pada suatu program; terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan baik berupa pengerahan personil (SDM), barang modal (peralatan) dan dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program prioritas BPBD yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao
Program Kegiatan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening							Program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2020		Kondisi Kinerja Kerja pada akhir periode RENJA OPD			
												Realisasi	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunkan Risiko Bencana bagi Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Bencana	1	05	1	05	03	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	303,112,190	100%	303,112,190		
		1	05	1	05	03	01	01	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetak dan penggandaan, sarana penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bulan	12 bulan	32,415,740	12 bulan	32,415,740	BPBD	Kab. Rote Ndao

		1	05	1	05	03	01	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas Operasional, Meubelair dan Modal Lainnya; Honor PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil	3 unit (2 notebook, 1 printer)	3 unit (2 notebook, 1 printer)	16,500,000	3 unit (2 notebook, 1 printer)	16,500,000	BPBD	Rote-kupang
		1	05	1	05	03	01	03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Tersedianya Pemeliharaan dan perijinan, Kendaraan Dinas Operasional, perbaikan peralatan kerja, pemeliharaan kendaraan dinas Aset Lainnya	(4 mobil, 4 motor, 1 mobil tanki), (3 Ac, 2 Laptop), (4 1 viar)	(4 mobil, 4 motor, 1 mobil tanki), (3 Ac, 2 Laptop), (4 1 viar)	106,567,250	(4 mobil, 4 motor, 1 mobil tanki), (3 Ac, 2 Laptop), (4 1 viar)	106,567,250	BPBD	Rote-kupang
		1	05	1	05	03	01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang	9 orang	43,200,000	9 orang	43,200,000	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	1	05	03	01	05	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah		tersusunnya revisi RENJA, RENJA, Profil OPD, LKIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi RENJA dan pelaporan lainnya	1 dokumen	7 dokumen	9,554,000	7 dokumen	9,554,000	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	1	05	03	01	06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari - hari tertentu	0	10 pasang	5,625,000	10 pasang	5,625,000	BPBD	Kab. Rote Ndao

		1	05	1	05	03	01	07	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi / konsultasi tugas Dalam wilayah Provinsi NTT dan Luar Daerah	21 kali	20 kali	89,250,200	20 kali	89,250,200	BPBD	Prov. NTT dan Luar Provinsi NTT
Menurunkan Risiko Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Bencana	1	05	1	05	03	17		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		100%	577,869,900	100%	577,869,900		
		1	05	1	05	03	17	01	Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi			Tersedianya dokumen kajian resiko bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi	0	-	-	-	-		
		1	05	1	05	03	17	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			Jumlah penduduk yang memperoleh informasi dan edukasi rawan bencana per je	600 orang	3000 orang	69,596,000	3000 orang	69,596,000	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	1	05	03	17	03	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi serta Gladi Kesiapsiagaan			Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan, mitigasi serta gladi kesiapsiagaan	-	-	4,050,000	-	4,050,000	BPBD	
		1	05	1	05	03	17	04	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan serta perlindungan terhadap bencana			Jumlah warga yang mendapatkan layanan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	150 orang	165 orang	249,279,000	165 orang	249,279,000	BPBD	Kab. Rote Ndao

		1	05	1	05	03	17	05	Response cepat KLB/wabah zoonis prioritas/ kejadian darurat bencana serta pencarian, pertolongan, evakuasi korban			Jumlah status kondisi darurat bencana yang dikeluarkan pemerintah	2	2 pernyataan darurat bencana	190,826,000	2 pernyataan darurat bencana	190,826,000	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	1	05	03	17	06	Aktivasi sistem komando penanganan darurat			Jumlah petugas posko yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	50 orang	64,118,900	50 orang	64,118,900	BPBD	Kab. Rote Ndao

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja Kerja pada akhir periode renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
		1	05	01			Program :	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	1.479.588.720	100%	1.471.379.964	100%	1.791.573.992	100%	1.139.613.900	100%	9.283.368.352	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.01		Kegiatan :	1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 dokumen	19 dokumen	10.000.000	19 Dokumen	10.000.000	19 Dokumen	6.530.400	19 Dokumen	6635400	76 Dokumen	33.165.800	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.01	01	Sub Kegiatan :	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD dan Perubahan DPA PD	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	4.430.400	12 bulan	4.430.400	48 dokumen	24.860.800	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.01	07	Sub Kegiatan :	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi Renja per triwulan	7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000	7 Dokumen	2.000.000	7 Dokumen	2.100.000	7 dokumen	2.205.000	28 dokumen	8.305.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.02		kegiatan :	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	13 orang/bulan	14 orang/bulan	682.308.650	14 orang/bulan	697.004.394	14 orang / bulan	800.453.992	14 orang / bulan	901.544.000	14 orang/bulan	3.081.311.036	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.02	01	Sub Kegiatan :	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	9 orang/bulan	10 orang/bulan	649.392.650	10 orang/bulan	653.924.394	10 orang / bulan	757.373.992	10 orang	859.664.000	10 orang	2.920.355.036	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.02	03	Sub Kegiatan :	2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	4 Orang	4 Orang	32.916.000	4 Orang	43.080.000	4 orang	43.080.000	4 orang	41.880.000	4 Orang	160.956.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.03		kegiatan :	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 orang	3 orang	11.874.000	3 orang	11.874.000	3 orang	9.000.000	3 orang	9.000.000	3 orang	41.748.000	BPBD	Kab. Rote Ndao

		1	05	01	2.03	02		Sub Kegiatan :	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD	5 orang	3 orang	11.874.000	3 orang	11.874.000	3 orang	9.000.000	3 orang	9.000.000	3 orang	41.748.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.05			kegiatan :	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	16 orang	16 orang	240.000.000	16 orang	240.000.000	16 orang	0	0	0	16 orang	480.000.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.05	03		Sub Kegiatan :	4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	-	16 orang	240.000.000	16 orang	240.000.000	16 orang	0	0	0	16 orang	480.000.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.06			kegiatan :	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	134.932.070	100%	134.932.070	100%	76.904.600	100%	76.062.100	100%	416.618.340	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	05	01	2.06	01		Sub Kegiatan :	5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	525.000	12 bulan	525.000	48 bulan	2.050.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.06	02		Sub Kegiatan :	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	5 Unit	16.429.070	4 unit	16.429.070	4 Unit	17.500.000	4 unit	11.287.000	17 Unit	61.645.140	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.06	05		Sub Kegiatan :	5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	7.732.000	12 bulan	7.732.000	12 bulan	8.118.600	12 bulan	8.118.600	48 bulan	31.710.200	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.06	07		Sub Kegiatan :	5.4	Penyediaan Bahan/Material	- Tersedianya alat tulis Kantor - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	0	0	0	0	24 bulan	21.500.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.06	04		Sub Kegiatan :		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0	0	0	0	12 bulan	11.287.000	12 bulan	11.300.000	24 bulan	22.587.000		
		1	5	01	2.06	09		Sub Kegiatan :	5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	26 kali	20 kali	99.521.000	20 kali	99.521.000	20 kali	39.474.000	20 kali	38.610.000	80 kali	277.126.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Provinsi NTT, Luar Provinsi NTT
		1	5	01	2.08			kegiatan :	6.1	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	100%	26.941.000	100%	23.113.000	100%	24.270.000	100%	25.567.500	100%	99.891.500	BPBD	
		1	5	01	2.08	01		Sub Kegiatan :	6.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai surat menyurat	12 bulan	12 bulan	913.000	12 bulan	913.000	12 bulan	960.000	12 bulan	1.092.000	48 bulan	3.878.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.08	02		Sub Kegiatan :	6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 bulan	12 Bulan	26.028.000	12 bulan	22.200.000	12 bulan	23.310.000	12 bulan	24.475.500	48 bulan	96.013.500	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao
		1	5	01	2.09			kegiatan :	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	133.533.000	100%	114.456.500	100%	120.155.000	100%	120.805.000	100%	488.949.500	BPBD	

		1	5	01	2.09	02		Sub Kegiatan :	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	480.805.500	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote				
										Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional		14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	118.645.000	14 unit	BPBD/ SEKRETARIAT	Ndao				
		1	5	01	2.09	06		Sub Kegiatan :	7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		8 Unit	8 Unit	5 unit	5 Unit	2.050.000	2.160.000	26 unit	8.144.000	BPBD/ SEKRETARIAT	Kab. Rote Ndao		
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	1	5	03				Program :		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang) Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	515.114.000	100%	490.011.000	100%	754.260.000	100%	866.750.000	100%	2.574.255.000	BPBD	Kab. Rote Ndao
		1	05	03	2.01			kegiatan :		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	315.115.000	100%	230.011.000	0	0	-	100%	518.126.000	BPBD	Kab. Rote Ndao	
		1	05	03	2.01	01		Sub Kegiatan :		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen kajian resiko bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi	0	1 Dokumen	274.066.000	1 dokumen	160.011.000	0	0	-	2 dokumen	407.077.000	BPBD / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT	
		1	05	03	2.01	02		Sub Kegiatan :		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi dan edukasi rawan bencana	-	2500 orang	41.049.000	2500 orang	70.000.000	0	0	-	5.000 orang	111.049.000	BPBD / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Rote Ndao	
		1	05	03	2.02			kegiatan :		Pelayanan Pencegahan dan	Meningkatnya pelayanan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Kab.		

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	199.999.000	135.000.000	346.240.000	546.230.000	1.227.469.000	BPBD	Rote Ndao
--------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	------	-----------

		1	05	03	2.02	02		Sub Kegiatan :		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan	-	400 orang	0	400 orang	50.000.000	400 orang	285.000.000	600 orang	485.000.000	1.800 orang	820.000.000	BPBD / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Rote Ndao	
										Jumlah Desa													BPBD / Kabid	Kab.	
										Tanggung Bencana			0	0	10	0	10	0	10	0	30	0	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rote Ndao	
		1	05	03	2.02	03		Sub Kegiatan :		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah warga yang mendapatkan layanan pusdalops,	-	100 orang	199.999.000	150 orang	85.000.000	150 orang	61.240.000	150 orang	61.230.000	550 orang	407.469.000	BPBD / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Rote Ndao	
										Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	sarana prasarana perlindungan terhadap bencana, logistik														
		1	05	03	2.03			kegiatan :		Pelayanan Penyelamatan dan	terkena bencana, dan bantuan air tanki													Kab.	
										Meningkatnya pelayanan															
		1	05	03	2.03	02		Sub		Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	95.000.000	100%	125.000.000	100%	408.020.000	100%	320.520.000	100%	828.660.000	BPBD	Rote Ndao	
										Jumlah status															
								Kegiatan :		Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kondisi darurat bencana yang dikeluarkan pemerintah daerah	-	2 Pernyataan	45.000.000	2 pernyataan darurat bencana	75.000.000	2 pernyataan darurat bencana	50.520.000	2 pernyataan darurat bencana	50.520.000	8 pernyataan darurat bencana	101.160.000	BPBD / Kabid Kedaruratan dan Logistik	Kab. Rote Ndao	
		1	05	03	2.03	05		Sub Kegiatan :		Aktivasi Sistem Komando	Jumlah petugas posko yang aktif													BPBD / Kabid	Kab.
										Penanganan Darurat Bencana	dalam penanganan darurat bencana		50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	50.000.000	200 orang	230.000.000	Kedaruratan dan Logistik	Rote Ndao	
		1	05	03	2.03	001		Sub Kegiatan :		Respon Cepat Bencana Non Alam	Tersedianya Tenaga													BPBD / Kabid	Kab.
										Penanganan Bencana														Kedaruratan dan Logistik	Rote Ndao
		1	05	03	2.04			kegiatan :		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	BPBD	Kab. Rote Ndao	
										Jumlah Desa															
		1	05	03	2.04	02		Sub Kegiatan :		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	-	-	10	-	10	0	10	0	30	0	BPBD / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Rote Ndao	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENJA) ini memiliki jangka waktu Tahun 2024 sesuai dengan masa kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sesuai pula dengan jangka waktu RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024. Dokumen RENJA ini menjadi pedoman Renja setiap Tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada Tahun 2024 tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP Daerah.

Dengan ditetapkannya Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program /Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk lima tahun kedepan (2024) diharapkan menjadi acuan lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian visi pembangunan Daerah yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan berkelanjutan bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**.

Ba'a, 17 Juli 2023

Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rote Ndao



Diksel S. Haning, SE

Pembina

NIP. 19771210 200701 1 013